

SURVEI KINERJA 23 PROGRAM DEDIKASI IDAMAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Efri Novianto¹, Martain²

^{1,2}Universitas Kutai Kartanegara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Alamat Korespondensi: efrinovianto@unikarta.ac.id

Abstract:

This research is to describe the public's perception of the performance of the Kutai Kartanegara government using a survey method in eleven sub-districts and 280 respondents. Based on the survey results, the performance of the health sector received the highest score of 77.95 while the lowest was in the field of providing employees with a score of 56.07. Overall, the performance of the general government in Kutai Kartanegara Regency received a score of 70.90, which is included in category C or medium. Another finding is that the majority of respondents (57.09%) are not aware of the 23 dedication programs that are strategic projects for the government of Kutai Kartanegara Regency. The program that is most widely known by the public is the 50 Million per RT (Kukar Bebaya) program of 71.10%, while the program that is least known to the public is the area-based agricultural development program which is only known by 22.50%. The performance of Kukar Care for Health Program has the highest score, namely 77.22, while the lowest performance is in the Area-Based Agriculture development Program with a score of 69.44. Overall, the average performance of the 23 dedication programs in Kutai Kartanegara Regency was a score of 73.68, which is in category C or medium.

Keywords: Survey, Public Perception, Performance

Abstrak:

Penelitian ini untuk menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kutai Kartanegara dengan metode survei di sebelas kecamatan dan 280 responden. Berdasarkan hasil survei, kinerja bidang kesehatan mendapatkan skor tertinggi sebesar 77,95 sedangkan yang terendah pada bidang penyediaan lapangan pekerjaan dengan skor 56,07. Secara keseluruhan kinerja pemerintahan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan skor 70,90 masuk dalam kategori C atau sedang. Temuan lainnya mayoritas responden (57,09%) tidak tahu dengan 23 program dedikasi yang menjadi proyek strategis pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Program yang paling banyak dikenal oleh masyarakat adalah program 50 Juta per RT (Kukar Bebaya)

sebesar 71,10%, sedangkan program yang paling tidak dikenal masyarakat adalah program pembangunan pertanian berbasis kawasan yang hanya dikenal oleh 22,50%. Kinerja Program Kukar Peduli Kesehatan memiliki skor tertinggi yaitu 77,22 sedangkan kinerja terendah ada pada program pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan dengan skor 69,44. Secara keseluruhan kinerja rata-rata 23 program dedikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan skor 73,68 masuk dalam kategori C atau sedang.

Kata Kunci : Survei, Persepsi Masyarakat, Kinerja

Pendahuluan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mendorong pemerintahan daerah untuk mengelola dan menata daerahnya dengan pendekatan yang efektif dan inovatif. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk memprakarsai, mengkreasikan dan secara inovatif melakukan berbagai terobosan yang dapat meningkatkan keunggulan daerah. Tentunya tugas ini tidak dapat dikerjakan sendiri oleh pemerintah daerah, peran aktif dari masyarakat dan sektor swasta diperlukan untuk mempercepat tujuan pembangunan daerah melalui pendekatan kolaboratif.

Labaria, Gotanco dan Caleda (2017) dalam tulisannya mengatakan bahwa saat ini muncul tren pemerintah lokal menggunakan perspektif masyarakat sebagai salah satu komponen penting dalam penilaian kinerja layanan. Adapun data dan informasi yang diperoleh dari masyarakat dianggap 'berguna' jika (1) dapat membantu menyusun arahan institusi penyedia layanan di masa depan, (2) dapat membantu mengidentifikasi dan mengeliminasi layanan dan kebijakan yang tidak efisien, (3) mampu mencerminkan umpan balik masyarakat yang dapat ditindaklanjuti, (4) disajikan dalam bentuk data dan bukti valid serta handal, dan (5) mudah ditafsirkan oleh pengguna.

Tugas utama pemerintah kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan publik yang terbaik dan efisien; baik berupa pelayanan barang dan jasa, maupun pelayanan maupun administratif atau surat menyurat dan perizinan. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara jelas disebutkan bahwa kewajiban pemerintah baik pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Visi-Misi Kukar Idaman dituntut untuk mampu meningkatkan pelayanan publik di segala bidang. Tahun ini (2022) merupakan tahun pertama pelaksanaan Visi-Misi melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Sebagai rujukan pembangunan daerah sekaligus indikator capaian kinerja pemerintahan; menarik untuk dilakukan penelitian terkait dengan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Masyarakat sebagai salah satu sumber informasi yang sangat berharga untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan barang, jasa, fasilitas atau sarana dan prasarana publik serta pelayanan administratif lainnya. Penelitian ini

membatasi diri hanya pada persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan secara umum; tidak pada capaian atas kinerja pemerintah yang sudah ditetapkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPMJD maupun Renstra masing-masing perangkat daerah. Penelitian ini juga tidak terbatas pada penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh unit pelayanan, sehingga indikator yang digunakan berbeda dengan indikator standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Penelitian ini difokuskan pada kewajiban dan kewenangan pemerintah kabupaten menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diantaranya adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta sosial. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam penyediaan layanan dasar yang menyangkut kinerja bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta bidang sosial dengan membandingkan kondisi dirasakan oleh masyarakat atau responden sebelumnya. Untuk mendukung hal tersebut, maka ditanyakan juga persepsi masyarakat terhadap situasi perekonomian, politik, penegakan hukum, keamanan, penyediaan lapangan pekerjaan, pelayanan administrasi dan lingkungan yang merupakan *outcome* dari pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu juga penelitian ini juga akan mengukur persepsi masyarakat terhadap kinerja 23 program dedikasi Kukar Idaman yang merupakan proyek strategis Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan apa saja yang perlu diperhatikan terkait dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ?

Kerangka Teori

Survei Persepsi Masyarakat

Persepsi berasal dari bahasa latin *perceptio*, *percipio* yaitu tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan (Schacter, 2011). Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf, yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindraan, hanya saja bukan penerimaan isyarat secara pasif, tetapi dibentuk oleh pengalaman dan pembelajaran

Survei persepsi masyarakat telah digunakan di banyak negara untuk mengukur sikap masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan; sebagai umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan layanan publik itu sendiri. Howard (2010) dalam tulisannya menyebutkan beberapa masalah yang seringkali dihadapi dalam

melakukan survei persepsi masyarakat diantaranya terkait dengan desain penelitian (keterwakilan sampel), pelaksanaan (respon yang rendah dari responden), validitas data hingga pelaporan survei. Selanjutnya Hjortskov (2017) menyebutkan kemungkinan terjadi bias kognitif pada persepsi masyarakat tentang kinerja pemerintahan. Sejalan dengan pendapat Roch dan Poister (2006), kompleksitas penggunaan survei masyarakat sebagai suatu mekanisme pertanggungjawaban kinerja pemerintah harus ditinjau secara kritis dan menyarankan untuk dilakukan pengujian secara empiris dengan membandingkan antara persepsi kinerja, harapan dan kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik.

Ada beberapa metode yang diperkenalkan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pada layanan pemerintah daerah diantaranya *importance-performance analysis*; yaitu membandingkan dua pendekatan yaitu, ukuran kepentingan yang diperoleh secara eksplisit dengan ukuran kepentingan yang diperoleh dari hasil analisis regresi. Selanjutnya *Split-Ballot Experiment* yang merupakan teknik eksperimental dimana kelompok responden yang disurvei menerima versi yang berbeda dari kuesioner secara acak.

Temuan penelitian Zhao (2015) dan Hu menyatakan bahwa warga usia muda, berpendidikan dan berpenghasilan tinggi, memiliki kemungkinan lebih rendah untuk percaya pada layanan pemerintah. Temuan penelitian Kelly dan Swindell (2002), menyimpulkan terlepas dari perdebatan antara pemanfaatan respons pengguna berpengalaman dan tidak berpengalaman dalam layanan publik, kedua kelompok masyarakat tersebut memiliki informasi penting tentang pengembangan dan/atau perbaikan layanan.

Dalam konteks bernegara, pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat telah menyusun ketentuan mekanisme evaluasi layanan publik oleh masyarakat dalam bentuk Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei kepuasan atau persepsi masyarakat dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintahan khususnya dalam penyediaan layanan publik. Hasil dari evaluasi masyarakat tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan kinerja pemerintahan khususnya terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam konteks survei persepsi masyarakat, format survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik tidak digunakan dalam penelitian ini. Asumsi yang kami gunakan bahwa sembilan unsur yang menjadi dimensi dalam survei kepuasan masyarakat versi pemerintah merupakan penilaian yang digunakan untuk masing-masing unit layanan, sehingga masyarakat sebagai responden akan sulit untuk menilai unit layanan mana yang akan diberikan penilaian. Selain itu desain pertanyaan yang diajukan hanya berlaku pada unit yang disurvei, sehingga hasilnya tidak dapat mencerminkan kepuasan/

ketidakpuasan pada unit layanan lainnya, sehingga menyulitkan generalisasi terhadap kinerja pemerintahan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Atas dasar tersebut, disusunlah instrumen survei hasil pengembangan dimana Instrumen survei tersebut memberikan peluang kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk ikut berpartisipasi memberikan tanggapannya terkait dengan indikator layanan dasar umum dan indikator layanan dasar spesifik (23 program dedikasi/ proyek strategis pemerintah).

Kinerja Pemerintahan

Pemerintah mendefinisikan kinerja sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006).

Kinerja instansi pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi maupun strategi instansi tersebut yang mengindikasikan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kewajiban dan kewenangan pemerintah kabupaten menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diantaranya adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta sosial yang merupakan standar pelayanan minimal (SPM) pemerintah daerah. Penelitian ini diarahkan untuk melihat persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam penyediaan layanan dasar yang menyangkut kinerja bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta bidang sosial dengan membandingkan kondisi dirasakan oleh masyarakat atau responden sebelumnya. Untuk mendukung hal tersebut, maka ditanyakan juga persepsi masyarakat atau responden terhadap situasi perekonomian, politik, penegakan hukum, keamanan, penyediaan lapangan pekerjaan, pelayanan administrasi dan lingkungan yang merupakan *outcome* dari pelaksanaan SPM tersebut.

Menguatkan capaian kinerja pemerintah umum, penelitian ini juga akan mengukur persepsi masyarakat terhadap kinerja 23 program dedikasi Kukar Idaman yang merupakan proyek strategis Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini juga membatasi diri hanya pada persepsi masyarakat; tidak dalam rangka mengukur capaian kinerja masing-masing perangkat daerah yang telah ditetapkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) masing-masing perangkat daerah.

Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan, penelitian merupakan penelitian survei deskriptif. Survei ini dilaksanakan di sebelas kecamatan yaitu Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Muara Badak, Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Muara Kaman, Samboja, Muara Jawa dan Tenggarong Seberang. Penetapan lima Kecamatan tersebut berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk yang besar dan dianggap dapat mewakili tujuh

kecamatan lainnya yaitu Muara Muntai, Sanga-Sanga, Marang Kayu, Kembang Janggut, Tabang, Kenohan dan Muara Wis.

Dengan jumlah populasi (penduduk) mencapai 734.485 jiwa, dengan tingkat kepercayaan 94% dan *margin of error* ± 6%, maka sampel ditetapkan sebesar 278 responden dibulatkan menjadi 280 responden yang tersebar secara proporsional di sebelas Kecamatan. Penetapan jumlah responden menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Na^2}$$

n = sampel

N = populasi

a = alpa/ *margin of error*

Adapun penetapan sebelas kecamatan sebaran responden didasarkan pada jumlah masing-masing penduduk. Dengan pertimbangan keterwakilan wilayah, maka ditetapkan 11 Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar sebagaimana tergambar pada tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Populasi dan Sampel

No	Kecamatan	Populasi	%	Sampel		Desa/Kel
1	Loa Kulu	53.652	8,78	25	20	2
2	Loa Janan	69.876	11,43	32	30	3
3	Anggana	35.009	5,73	16	20	2
4	Muara Badak	47.130	7,71	22	20	2
5	Tenggarong	108.539	17,76	50	50	5
6	Sebulu	40.652	6,65	19	20	2
7	Kota Bangun	36.205	5,92	17	20	2
8	Muara Kaman	42.073	6,88	19	20	2
9	Samboja	67.345	11,02	31	30	3
10	Muara Jawa	41.778	6,83	19	20	2
11	Tenggarong Seberang	69.003	11,29	32	30	3
Jumlah		611.262		280		28

Sumber: diolah dari data Disdukcapil 2021

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik survei tatap muka yaitu dengan cara mewawancarai responden secara langsung dibantu dengan daftar pertanyaan semi terstruktur berupa lembaran kuisioner. Teknik ini dimaksudkan untuk mencegah bias informasi akibat salah persepsi terhadap pertanyaan dan/ atau jawaban yang diberikan oleh responden. Teknik penentuan responden menggunakan metode *multistage random sampling* atau metode penentuan responden secara bertingkat mulai dari tingkat Kecamatan, kemudian

Desa/ Kelurahan, RT dan responden (laki-laki dan perempuan) yang ditetapkan secara proporsional.

Jawaban responden yang ada dalam lembar kuisioner selanjutnya dikonversi menjadi angka dan dianalisis menggunakan alat analisis *frekuensi*.

Jika jawaban a skor 4

Jika jawaban b skor 3

Jika jawaban c skor 2

Jika jawaban d skor 1

Jawaban responden tersebut kemudian diambil nilai rata-rata untuk kemudian di kalikan dengan nilai dasar 25; selanjutnya hasilnya dimasukkan dalam tabel interval selanjutnya diberi kategori dan makna.

Tabel 2. Skala Nilai, Kategori & Makna

SKALA NILAI	KATEGORI	MAKNA KINERJA
≤ 39,99	E	Sangat Rendah
40,00 – 59,99	D	Rendah
60,00 - 79,99	C	Sedang
80,00 – 89,99	B	Tinggi
≥ 90	A	Sangat Tinggi

Sumber: disarikan dari Permendagri 38 Tahun 2020

Hasil dan Pembahasan

Kinerja Pemerintahan Umum

Dalam menganalisis kinerja pemerintah umum di Kabupaten Kutai Kartanegara, indikator yang digunakan adalah kewajiban dan kewenangan pemerintah kabupaten menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diantaranya adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum (jalan dan jembatan), perumahan rakyat dan kawasan permukiman (air bersih dan listrik), ketenteraman dan ketertiban umum (politik, hukum dan keamanan). Selain SPM diatas, juga akan dilihat kinerja bidang perekonomian, penyediaan lapangan pekerjaan, layanan administratif dan lingkungan.

Pada bidang pendidikan mayoritas menilai bahwa kondisi saat ini cukup baik dari sebelumnya sebanyak 62,5% responden, lebih baik sebanyak 21,8%, sama seperti sebelumnya sebanyak 14,6% dan lebih buruk sebanyak 1,1%.

Pada bidang kesehatan mayoritas menilai bahwa kondisi saat ini cukup baik dari sebelumnya sebanyak 60,7% responden, lebih baik sebanyak 25,7%, sama seperti sebelumnya sebanyak 13,2% dan lebih buruk sebanyak 0,4%.

Pada bidang pekerjaan umum khususnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan mayoritas menilai bahwa kondisi saat ini cukup baik dari sebelumnya sebanyak 54,6% responden, lebih baik sebanyak 26,8%, sama seperti sebelumnya sebanyak 15,4% dan lebih buruk sebanyak 3,2%.

Pada bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman khususnya penyediaan air bersih mayoritas menilai bahwa kondisi saat ini cukup baik dari sebelumnya sebanyak 57,1% responden, lebih baik sebanyak 23,6%, sama seperti sebelumnya sebanyak 18,2% dan lebih buruk sebanyak 1,1%.

Sama seperti air bersih, pada bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dalam hal penyediaan penerangan atau listrik mayoritas menilai bahwa kondisi saat ini cukup baik dari sebelumnya sebanyak 56,5% responden, lebih baik sebanyak 26,1%, sama seperti sebelumnya sebanyak 16,4% dan lebih buruk sebanyak 1,1%.

Pada bidang layanan administratif mayoritas responden menilai bahwa kondisi layanan administratif yang disediakan oleh pemerintah cukup baik sebanyak 51,1%, sama seperti sebelumnya sebanyak 26,1%, lebih baik sebanyak 20,7% dan sisanya responden menganggap lebih buruk dari sebelumnya sebanyak 2,1%.

Pada bidang penyediaan akses dan kesempatan kerja (lapangan pekerjaan) mayoritas responden menilai bahwa kondisi lapangan pekerjaan saat ini sama seperti sebelumnya sebanyak 37,9%, cukup baik sebanyak 32,5%, lebih buruk sebanyak 22,5% dan sisanya responden menganggap lebih baik dari sebelumnya sebanyak 7,1%.

Pada bidang perekonomian, mayoritas responden menilai bahwa kondisi perekonomian saat ini cukup baik sebanyak 42,5%, sama seperti sebelumnya sebanyak 32,3%, lebih buruk sebanyak 14,3% dan sisanya responden menganggap lebih baik dari sebelumnya sebanyak 10,7%.

Pada bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam hal ini dilihat dari situasi politik, mayoritas responden menilai bahwa kondisi politik saat ini sama seperti sebelumnya sebanyak 44,3%, cukup baik sebanyak 42,1%, lebih baik sebanyak 6,8% dan lebih buruk dari sebelumnya sebanyak 6,8%.

Dari sisi penegakan hukum, mayoritas responden menilai bahwa kondisi penegakan hukum saat ini cukup baik sebanyak 55,7%, sama seperti sebelumnya sebanyak 28,9%, lebih baik dari sebelumnya sebanyak 11,1% dan sisanya menilai lebih buruk dari sebelumnya sebanyak 4,3%.

Sedangkan dari sisi keamanan, mayoritas responden menilai bahwa kondisi keamanan saat ini cukup baik sebanyak 58,2%, lebih baik dari sebelumnya sebanyak 17,5%, sama seperti sebelumnya sebanyak 19,6% dan sisanya menilai lebih buruk dari sebelumnya sebanyak 4,6%.

Sedangkan pada bidang lingkungan mayoritas responden menilai bahwa kondisi lingkungan saat ini cukup baik sebanyak 57,5%, lebih baik sebanyak 21,1%, sama seperti sebelumnya sebanyak 18,2% dan sisanya responden menganggap lebih buruk dari sebelumnya sebanyak 3,2%.

Jika dibuat perbandingan kinerja antar bidang, maka Kinerja bidang kesehatan dipersepsikan cukup baik oleh responden dengan skor 77,95 di ikuti dengan kinerja bidang penyediaan listrik/ penerangan dengan skor 76,61, bidang pendidikan dan penyediaan infrastruktur (jalan dan jembatan) masing-masing mendapatkan nilai persepsi 76,25.

Sedangkan nilai persepsi terendah pada bidang penyediaan lapangan pekerjaan dengan skor 56,07 di ikuti dengan situasi politik dengan 62,23 dan kondisi

perekonomian dengan skor 62,41. Secara keseluruhan kinerja pemerintahan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan skor 70,90 masuk dalam kategori C atau sedang.

Tabel 3. Skor, Kategori dan Makna Kinerja

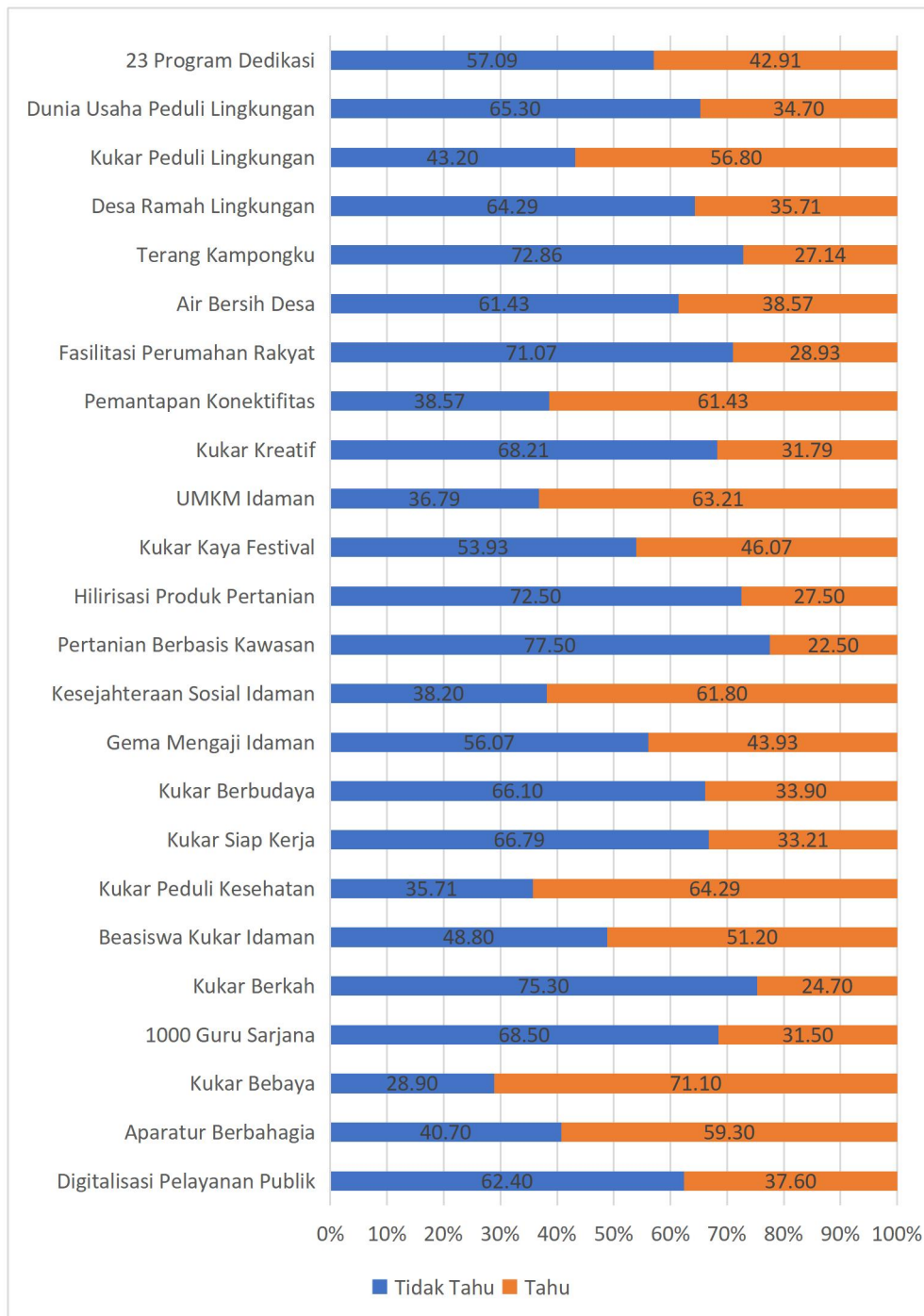
NO	KINERJA BIDANG	NILAI PERSEPSI	SKOR	KATEGORI	MAKNA
1	Pendidikan	3,05	76,25	C	SEDANG
2	Kesehatan	3,12	77,95	C	SEDANG
3	Penyediaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3,05	76,25	C	SEDANG
4	Penyediaan Air Bersih	3,03	75,80	C	SEDANG
5	Penyediaan Listrik/ Penerangan	3,06	76,61	C	SEDANG
6	Penyediaan Layanan Administrasi	2,90	72,59	C	SEDANG
7	Penyediaan Lapangan Pekerjaan	2,24	56,07	D	RENDAH
8	Kondisi Perekonomian	2,50	62,41	C	SEDANG
9	Kondisi Politik	2,49	62,23	C	SEDANG
10	Kondisi Penegakan Hukum	2,74	68,39	C	SEDANG
11	Kondisi Keamanan	2,89	72,14	C	SEDANG
12	Kondisi Lingkungan	2,96	74,11	C	SEDANG
Nilai Rata-Rata		2,84	70,90	C	SEDANG

Sumber: diolah dari data penelitian

Kinerja 23 Program Dedikasi

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih, Edi-Rendi mengusung Visi mewujudkan Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Bahagia, dengan 5 Misi Pembangunan. Selanjutnya Visi dan Misi selama kampanye tersebut dijadikan dasar penyusunan RPMJD Kutai Kartanegara sehingga menjadi Visi dan Misi Pembangunan Kutai Kartanegara periode 2021-2026. Untuk percepatan pencapaian Visi dan Misi pembangunan tersebut, maka disusunlah 23 program dedikasi yang menjadi proyek strategis kabupaten. Selanjutnya hasil penelitian ini akan menggambarkan bagaimana tingkat pengenalan dan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan 23 program dedikasi.

Gambar 1. Pengetahuan Responden terhadap 23 Program Dedikasi



Sumber: diolah dari data penelitian

Berdasarkan pengetahuan responden, mayoritas responden (57,09%) tidak tahu dengan 23 program dedikasi yang menjadi proyek strategis pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan sisanya (42,91%) menyatakan tahu atau pernah mendengar 23 program dedikasi tersebut. Banyaknya masyarakat yang tidak tahu dengan 23 program dedikasi tersebut mengindikasikan kurangnya sosialisasi program oleh pemerintah daerah khususnya perangkat daerah pengampuh urusan atau program dedikasi tersebut.

Jika di detailkan, maka program yang paling banyak dikenal oleh masyarakat adalah program 50 Juta per RT (Kukar Bebaya) sebesar 71,10%, sedangkan program yang paling tidak dikenal adalah program pembangunan pertanian berbasis kawasan. Mengingat tingginya ketidak tahuan masyarakat terhadap 23 program dedikasi tersebut, maka pemerintah daerah khususnya perangkat daerah pengampuh urusan atau program perlu mensosialisasikan keberadaan program tersebut.

Jika dibuat perbandingan persepsi atau tingkat kepuasan antar program dedikasi, program Kukar Peduli Kesehatan dengan skor 77,22 di ikuti dengan program Terang Kampongku dan program Kukar Kreatif dengan skor masing-masing 76,97. Sedangkan nilai persepsi terendah pada program pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan dengan skor 69,44 di ikuti dengan program 1000 Guru Sarjana dengan skor 70,66 dan program Fasilitasi Perumahan Rakyat dengan skor 70,37.

Secara keseluruhan kinerja rata-rata 23 program dedikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan skor 73,68 masuk dalam kategori C atau sedang.

Tabel 4. Persepsi Responden, Skor, Kategori dan Makna Kinerja

NO	PROGRAM	NILAI PERSEPSI	SKOR	KATEGORI	MAKNA
1	Digitalisasi Pelayanan Publik	2,91	72,64	C	SEDANG
2	Aparatur Negara Berbahagia	3,01	75,15	C	SEDANG
3	Kukar Bebaya	2,84	71,11	C	SEDANG
4	1000 Guru Sarjana	2,80	70,00	C	SEDANG
5	Kukar Berkah	3,00	75,00	C	SEDANG
6	Beasiswa Kukar Idaman	3,06	76,57	C	SEDANG
7	Kukar Peduli Kesehatan	3,09	77,22	C	SEDANG
8	Kukar Siap Kerja	2,87	71,77	C	SEDANG
9	Kukar Berbudaya	2,97	74,21	C	SEDANG
10	Gema Mengaji Idaman	2,93	73,17	C	SEDANG
11	Kesejahteraan Sosial Idaman	2,96	73,99	C	SEDANG
12	Pertanian Berbasis Kawasan	2,78	69,44	C	SEDANG
13	Hilirisasi Produk Pertanian	2,87	71,75	C	SEDANG
14	Kukar Kaya Festival	3,07	76,74	C	SEDANG
15	UMKM Idaman	2,94	73,59	C	SEDANG
16	Kukar Kreatif	3,08	76,97	C	SEDANG
17	Pemantapan Konektifitas	2,99	74,71	C	SEDANG
18	Fasilitasi Perumahan Rakyat	2,81	70,37	C	SEDANG
19	Air Bersih Desa	3,01	75,23	C	SEDANG
20	Terang Kampongku	3,08	76,97	C	SEDANG
21	Desa Ramah Lingkungan	2,89	72,25	C	SEDANG
22	Kukar Peduli Lingkungan	2,91	72,80	C	SEDANG
23	Dunia Usaha Peduli Lingkungan	2,92	72,94	C	SEDANG
	Nilai Rata-Rata	2,95	73,68	C	SEDANG

Sumber: diolah dari hasil penelitian

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan:

1. Kinerja bidang kesehatan dipersepsikan cukup baik oleh responden dengan skor 77,95 di ikuti dengan kinerja bidang penyediaan listrik/ penerangan

dengan skor 76,61, bidang pendidikan dan penyediaan infrastruktur (jalan dan jembatan) masing-masing mendapatkan nilai persepsi 76,25.

2. Kinerja terendah pada bidang penyediaan lapangan pekerjaan dengan skor 56,07 di ikuti dengan situasi politik dengan 62,23 dan kondisi perekonomian dengan skor 62,41.
3. Secara keseluruhan kinerja pemerintahan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan skor 70,90 masuk dalam kategori C atau sedang.
4. Mayoritas responden (57,09%) tidak tahu dengan 23 program dedikasi yang menjadi proyek strategis pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan sisanya (42,91%) menyatakan tahu atau pernah mendengar 23 program dedikasi tersebut.
5. Program yang paling banyak dikenal oleh masyarakat adalah program 50 Juta per RT (Kukar Bebaya) sebesar 71,10%, sedangkan program yang paling tidak dikenal masyarakat adalah program pembangunan pertanian berbasis kawasan yang hanya dikenal oleh 22,50%.
6. Kinerja Program Kukar Peduli Kesehatan memiliki skor tertinggi yaitu 77,22 di ikuti dengan program Terang Kampongu dan program Kukar Kreatif dengan skor masing-masing 76,97.
7. Kinerja terendah ada pada program pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan dengan skor 69,44 di ikuti dengan program 1000 Guru Sarjana dengan skor 70,66 dan program Fasilitasi Perumahan Rakyat dengan skor 70,37.
8. Secara keseluruhan kinerja rata-rata 23 program dedikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan skor 73,68 masuk dalam kategori C atau sedang.

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah khususnya Perangkat Daerah pengampuh urusan atau kewenangan perlu meningkatkan kinerja baik berdasarkan bidang maupun 23 program dedikasi, mengingat hanya 41,67% dari 12 bidang pemerintahan umum yang dinilai cukup baik kinerjanya dan 34,78% dari 23 program dedikasi yang memuaskan masyarakat; dan
2. Pemerintah Daerah khususnya Perangkat Daerah pengampuh urusan atau program perlu meningkatkan sosialisasi 23 program dedikasi, mengingat hanya 42,91% masyarakat yang tahu sedangkan sisanya 57,09% tidak tahu dengan 23 program dedikasi yang merupakan proyek strategis kabupaten.
3. Kinerja program pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan, program 1000 Guru Sarjana dan program Fasilitasi Perumahan Rakyat dengan skor 70,37 merupakan program prioritas yang paling harus ditingkatkan kinerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hjortskov, M. (2017). Priming and Context Effects in Citizen Satisfaction Surveys. *Public Administration*, 912-926.
- Howard, C. (2010). Are We Being Served? A Critical Perspective on Canada's. *International Review of Administrative Sciences*, 65-83.
- Kelly, J. M. (2002). A Multiple-Indicator Approach to Municipal Service Evaluation: Correlating Performance Measurement and Citizen Satisfaction across Jurisdictions. *Public Administration Reviews*, 610-621.
- Labaria, E. C. (2017). Framing the Role of and Defining Criteria for Usefulness of Citizen Satisfaction Surveys in Local Urban Environmental Management: The Case of the Local Government Unit of Quezon City, Philippines. *Environment and Urbanization ASIA*, 214-290.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Roch, C. H. (2006). Citizens, Accountability, and Service Satisfaction: The Influence of Expectations. *Urban Affairs Review*, 292-308.
- Schacter, D. (2011). *Psychology*. New York: Worth Publishers.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Zhao, D. a. (2015). Determinants of Public Trust in Government: Empirical Evidence from Urban China. *International Review of Administrative* , 358-377.